

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 11, No. 2, September 2020

ISSN: 2087-2054

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Dampaknya Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Logam Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2018

Yulistina, Dewi Silvia dan Euis Miftahul

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Fenti Fiqri Fadella, Riana R Dewi dan Rosa Nikmatul Fajri

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan *Tax Planning* Terhadap Manajemen Laba

Dina Cahyani, KartikaHendra

Financing Depoit Ratio, Beban Operasional Pendapatan Operasional, Non Performing Financing Dan Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia

Dodik Hartanto, Siti Nurlaela dan Kartika Hendra Titisari

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Indah Septiana, Nurdiawansyah, Aminah, Luke Suciyati Amna, dan Herry Goenawan Soedarsa

Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Vera Susanti, Syamsu Rizal, Indrayenti, Khairudin dan Haninun

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 11, No. 2, September 2020

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec.

Penanggung Jawab

Aminah, S.E., M.S.Ak

Pimpinan Redaksi

Dr. Haninun, S.E., M.S.Ak

Sekretaris Redaksi

Riswan, S.E., M.S.Ak
Luke Suciwati Amna, S.E., M.S.Ak

Penyuting Ahli (Mitra Bestari)

Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung)
Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telaah teoritis konseptual yang kritis dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung G- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 11, No. 2, September 2020

ISSN: 2087-2054

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Dampaknya Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Logam Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2018

Yulistina, Dewi Silvia dan Euis Miftahul

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Fenti Fiqri Fadella, Riana R Dewi, Rosa Nikmatul Fajri

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan *Tax Planning* Terhadap Manajemen Laba

Dina Cahyani dan KartikaHendra

Financing Depoit Ratio, Beban Operasional Pendapatan Operasional, Non Performing Financing Dan Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia

Dodik Hartanto, Siti Nurlaela dan Kartika Hendra Titisari

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Indah Septiana, Nurdiawansyah, Aminah, Luke Suciyati Amna, dan Herry Goenawan Soedarsa

Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Vera Susanti, Syamsu Rizal, Indrayenti, Khairudin dan Haninun

JURNAL

KEUANGAN

AKUNTANSI &

Volume 11, No. 2, September 2020

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Dampaknya Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Logam Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2018 Yulistina, Dewi Silvia dan Euis Miftahul	1-11
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Fenti Fiqri Fadella, Riana R Dewi, Rosa Nikmatul Fajri	12-29
Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan <i>Tax Planning</i> Terhadap Manajemen Laba Dina Cahyani dan KartikaHendra	30-44
Financing Depoit Ratio, Beban Operasional Pendapatan Operasional, Non Performing Financing Dan Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia Dodik Hartanto, Siti Nurlaela dan Kartika Hendra Titisari	45-57
Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Indah Septiana, Nurdiawansyah, Aminah, Luke Suciyati Amna, dan Herry Goenawan Soedarsa	58-69
Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Vera Susanti, Svamsu Rizal, Indraventi, Khairudin dan Haninun	70-86

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 11, No. 1, Maret 2020

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
 - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
 - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
 - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
 - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
 - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
 - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
 - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. *Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi*, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

**PENGARUH PEMBINAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KAMPUNG DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP
PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH
DESA ATAS DANA DESA PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Vera Susanti
Syamsu Rizal
Indrayenti
Khairudin
Haninun**

¹Faculty of Economic and Business, Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Bandar
Lampung, Indonesia

ABSTRACT

Management of village government financial accountability for village funds is expected to be carried out transparently and accountably that it could give positive impacts on village financial management of village funds. The aspect of managing village financial accountability for village funds can be improved not only by conducting guidance for village officials and doing supervision by the inspectorate, but must be supported by other factors such as village officials who are competent enough in finance, system application that facilitate village financial managers or village apparatus, regulations that change rapidly in managing and reporting accountability, etc.

The research subjects were 301 villages, with sample of 75 respondents. The results of the study were obtained DPMK guidance in a very good category. Supervision of the inspectorate in a very good category. Management of village government financial accountability for village funds in a very good category. DPMK guidance does not affect the village governments financial accountability for village funds, Supervision of the inspectorate influences the financial management of village government for village funds, DPMK guidance and Supervision of the Inspectorate influences the management of village government financial accountability for village funds. DPMK guidance and Supervision of the Inspectorate together can improve village government financial management for village funds.

Keywords: DPMK guidance, Inspectorate Supervision and management of village government financial accountability for village funds.

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah memperluas lingkup konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat. Desentralisasi dikembangkan hingga lingkup

pemerintahan desa karena desa merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki batas wilayah, sejumlah penduduk, adat istiadat, dan pranata lokal yang mengatur organisasinya sendiri (*self governing community*). Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah memandang perlu untuk memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian negara, memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penguatan otonomi desa ini juga menjadi aspirasi dari pemerintah desa agar desa mendapatkan dana desa yang memadai untuk menjalankan perannya sebagai subjek pembangunan.

Pemberian dana desa yang besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah dialokasikan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat berturut-turut sebesar 20,7 Trilyun untuk 74.093 desa tahun 2015, sebesar 46,9 Trilyun untuk 74.754 desa tahun 2016, sebesar 59,76 Trilyun untuk 74.954 desa tahun 2017 dan Anggaran DD sebesar 60 Trilyun untuk 2018. Salah satu kabupaten yang menerima dana desa di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari 28 Kecamatan dan 301 desa. Jumlah Dana Desa yang digulirkan pemerintah pada 301 desa sekabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2015 s.d 2018 senilai Rp.84.410.047.000 tahun 2015, Rp189.589.571.000, tahun 2016, Rp.241.434.963.000,00 tahun 2017 dan Rp155.189.185.800,00 semester I Tahun 2018. Selain Dana Desa terdapat pendapatan desa yang lain seperti Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, karena kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Jumlah dana desa yang dikelola oleh tiap-tiap desa yang besar dan semakin membesar tiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Salah satu titik kritisnya adalah dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009).

Tujuan pemerintahan memberikan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Agar pemberian dana desa dapat sesuai dengan harapan pemerintah pusat, maka diperlukan bimbingan atau pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tata kelola keuangan dana desa. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa diperlukan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. Kepala desa dan perangkat desa perlu dibekali ketrampilan dalam mengelola dana desa dan menggunakan secara sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian teknis.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di tingkat pemerintah kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati. Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus pemberdayaan masyarakat desa, Kecamatan dan Inspektorat Kabupaten. Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diketahui belum akuntabel, dimana pertanggungjawaban keuangan belum dilengkapi dengan

bukti pengeluaran yang sah. Pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten tidak disertai bukti yang lengkap dan tidak dilaporkan tepat waktu. Berlatar belakang uraian diatas penelitian ini dibuat dengan judul “**Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sinyal (legitimacy theory)

Pemerintah mengalokasikan dana desa sebagai bentuk penyalarsan tujuan dengan harapan masyarakat desa. Pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa sebagai *self governing community*. Praktik ini sesuai dengan *Legitimacy Theory* bahwa organisasi perlu menyalarskan nilai sosial yang terkait atau menjadi dampak dari kegiatan organisasi dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial yang lebih besar. Keselarasan tersebut merupakan upaya organisasi untuk menjadi legitimate dengan lebih memperhatikan lingkungan dan lingkup sosial (Dowling dan Pfeffer, 1975). Parsons dalam Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa legitimasi adalah penilaian atas aktivitas terkait penggunaan nilai bersama atau nilai umum dalam konteks keterlibatan aktivitas organisasi pada sistem sosial.

Pembinaan

Wiranto (1999), pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Pengawasan

Handyanungrat (1994), Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, pemerintah (*order*), terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

HIPOTESIS

1. Pembinaan DPMK Kabupaten Lampung Tengah berpengaruh terhadap Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa;
2. Pengawasan inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berpengaruh terhadap

- pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa;
3. Pembinaan DPMK dan Pengawasan inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berpengaruh terhadap pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa.

METODOLOGI

Penelitian ini penelitian kuantitatif yang bersifat kausal. Populasinya adalah Kepala Kampung atau perangkat Kampung yang berjumlah 301 Kampung. Sampel penelitian menurut Singarimbun dan Effendy (2007:82), adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat utama dari populasi dan dijadikan sebagai perwakilan atau representasi dalam penelitian, besarnya sampel dihitung menggunakan rumus Slovin didapatkan 75 Kepala Kampung atau Perangkat Desa dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Variabel Penelitian

Variabel dependen yaitu variabel terikat yang keberadaannya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa atas dana desa (Y).

Variabel Independen yaitu variabel bebas yang keberadaannya dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah pembinaan DPMK (X1) dan Pengawasan inspektorat (X2)

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Pembinaan DPMK (X1)

Pembinaan DPMK merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Variable pembinaan DPMK diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. fasilitasi dan koordinasi;
- b.peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. dukungan teknis administrasi

Pengawasan inspektorat (X2)

Pengawasan inspektorat adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, diukur dengan menggunakan indicator:

- a. Audit;
- b.Reviu;
- c.Monitoring;
- d.Evaluasi;
- e.Pemantauan;
- f. bimbingan teknis;
- g. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa atas dana desa (Y)

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. diukur dengan indikator:

- a. Transparan;
- b.Akuntabel;
- c.Partisipasi;
- d.Tertib dan disiplin

Pengukuran variable menggunakan kuesioner berskala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban:

- a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 ;
- b.Jawaban Setuju (S) diberi skor 4 ;

c. Jawaban Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3; d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2; e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

Teknik Analisis Data
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Uji Validitas

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen, Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid dengan nilai *Coorrected Item-Total Correlation*.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Ghozali (2009) adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner) dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*,

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisa yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Pengukuran diperoleh berdasarkan persepsi aparat kampung sebagai responden. Deskripsi data variabel didasarkan pada nilai interval.

Analisis kuantitatif
Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan mengetahui arah pengaruh variabel Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat terhadap variabel Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa. Rumus persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa a = Konstanta

B₁₂ = Koefisien regresi X₁ = Pembinaan DPMK

X₂ = Pengawasan Inspektorat e = Faktor kesalahan

Koefisien Korelasi

Korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya nilai hubungan Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat dengan Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa, yang dihitung dengan menggunakan rumus Korelasi *Product Moment* sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n\sum Y^2 - (n\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r = Korelasi

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat (Sugiyono, 2009:131)

Untuk mengetahui keeratan hubungan maka nilai korelasi yang diperoleh kemudian diinterpretasikan pada Korelasi sebagai berikut:

Nilai 0,801 sampai dengan 1,000 dengan 0,800	Korelasi Sangat Erat Nilai 0,601 sampai Korelasi Erat
Nilai 0,401 sampai dengan 0,600 dengan 0,400	Korelasi Cukup Erat Nilai 0,201 sampai Korelasi Lemah
Nilai 0,001 sampai dengan 0,200	Korelasi Sangat Lemah

Koefisien Determinasi

Determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya nilai pengaruh Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa, yang dihitung dengan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi r = nilai Korelasi (Sugiyono, 2009: 136)

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Untuk menguji hipotesis secara parsial (satu per satu) menggunakan Uji t, dengan terlebih dahulu menentukan nilai thitung, menggunakan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

thit = Pengujian signifikansi Korelasi *product moment*

r² = Korelasi *Product moment*

n = Jumlah anggota sampel

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Kriteria pengujiannya adalah:

a. Jika thitung < ttabel maka tidak ada pengaruh signifikan; b. Jika thitung ≥ ttabel maka ada pengaruh signifikan

Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Untuk menguji hipotesis secara simultan (bersama-sama) menggunakan Uji F, dengan terlebih dahulu menentukan nilai Fhitung, menggunakan rumus:

$$F_{hit} = \frac{R^2 (n - k - 1)}{k (1 - R^2)}$$

Keterangan:

Fhit = Nilai Uji F

R = Korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen n = Jumlah anggota sampel

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Kriteria pengujiannya adalah:

a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh signifikan; b. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka ada pengaruh signifikan
 (Sugiyono, 2009: 141)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas pada 30 butir kuesioner yang diajukan (Lihat pada Lampiran 3) dengan nilai kritik r (rtabel), yang diuji pada 75 responden, dengan menggunakan taraf kepercayaan 5%. yaitu 0.1914 (Lihat pada Lampiran 4). Sehingga diperoleh hasil uji validitas terlihat semua item pertanyaan yang diajukan untuk variabel penelitian valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai alpha dengan nilai kritik r (rtabel) pada jumlah sampel uji adalah 75 responden. Dengan taraf kepercayaan yang diambil adalah sebesar 95%, yaitu 0.1914. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Nilai Alfa	r tabel	Keterangan
Pembinaan DPMK	0,856	0,1914	Reliabel
Pengawasan Inspektorat	0,835	0,1914	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa	0,875	0,1914	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018

Pada table diatas dilihat hasil pengujian reliabilitas dari ketiga variabel yang diujikan memiliki nilai uji yang reliabel.

Deskripsi Data

Deskripsi Data Pembinaan DPMK

Deskripsi data jawaban responden pada variabel Pembinaan DPMK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Deskripsi Data Variabel Pembinaan DPMK

Pembinaan DPMK	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Baik	42 – 50	50	66,67
Baik	34 – 41	25	33,33
Cukup Baik	26 – 33	0	0
Tidak Baik	18 – 25	0	0
Sangat Tidak Baik	10 – 17	0	0
Jumlah		75	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Pada table 4.5 di atas diketahui sebagian besar Pembinaan DPMK masuk dalam kategori yang Sangat Baik yaitu 66,67%, dan pada tabel 4.6 kategori jawaban responden pada variabel Pembinaan DPMK menurut setiap pertanyaan adalah masuk dalam kategori Sangat Baik atau dengan nilai rata-rata persentase 88.08%. Hasil tersebut berarti Pembinaan oleh DPMK berupa fasilitasi, pendampingan, koordinasi, peningkatan dengan

pelatihan, aparat desa diberikan pelatihan dan monitoring dan evaluasi telah dilakukan dengan baik.

Tabel 4.6 Deskripsi Data Variabel Pembinaan DPMK Berdasarkan Pertanyaan

No	Pembinaan DPMK	Skor Capaian	Skor Maksimal	Persentase Capaian	Kategori
1	Menurut saya, fasilitasi oleh Dinas PMK bagi Pemerintah Desa terkait pengelolaan Dana Desa sangat penting.	351	375	93,6	Sangat Baik
2	Menurut saya, Dinas PMK telah melakukan fasilitasi dan pendampingan yang cukup dalam rangka pengelolaan Dana Desa.	329	375	87,73	Sangat Baik
3	Menurut saya, mudah melakukan koordinasi dengan Dinas PMK setiap ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa.	330	375	88	Sangat Baik
4	Menurut saya, kebutuhan pelatihan sangat penting diberikan untuk mendukung tugas aparat desa.	346	375	92,27	Sangat Baik
5	Menurut saya, Dinas PMK telah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk aparat desa mengikuti pelatihan.	338	375	90,13	Sangat Baik
6	Menurut saya, sudah ada kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pengetahuan yang ingin saya peroleh dalam menjalankan tugas sebagai aparat desa.	315	375	84	Sangat Baik
7	Menurut saya, metode pelatihan yang digunakan sudah sesuai dengan tingkat partisipasi tiap peserta.	312	375	83,2	Sangat Baik
8	Menurut saya, Dinas PMK sudah melakukan monitoring atas pengelolaan keuangan Dana Desa.	324	375	86,4	Sangat Baik
9	Menurut saya, Dinas PMK membuat pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	327	375	87,2	Sangat Baik
10	Menurut saya, Dinas PMK telah membuat pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.	331	375	88,27	Sangat Baik
	Rata-Rata Nilai:	330	375	88,08	Sangat Baik

Deskripsi Data Pengawasan Inspektorat

Tabel 4.7 Deskripsi Data Variabel Pengawasan Inspektorat

Pengawasan Inspektorat	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Baik	42 – 50	48	64,00
Baik	34 – 41	27	36,00
Cukup Baik	26 – 33	0	0
Tidak Baik	18 – 25	0	0
Sangat Tidak Baik	10 – 17	0	0
Jumlah		50	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Dari table 4.7 di atas diketahui bahwa sebagian besar pengawasan inspektorat masuk dalam kategori yang Sangat Baik.

Tabel 4.8 Deskripsi Data Variabel Pengawasan Inspektorat Berdasarkan Pertanyaan

No	Pengawasan Inspektorat	Nilai Capaian	Skor Maksimal	Persentase Capaian	Kategori
1	Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah melaksanakan audit Dana Desa.	315	375	84	Sangat Baik
2	Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah melaksanakan audit Dana Desa berdasarkan skala prioritas pemeriksaan.	319	375	85,07	Sangat Baik
3	Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah melaksanakan revidi Dana Desa.	312	375	83,2	Sangat Baik
4	Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah melaksanakan monitoring Dana Desa.	330	375	88	Sangat Baik
5	Menurut saya, monitoring atas Dana Desa dilakukan sebagai tindak lanjut pemeriksaan inspektorat sebelumnya.	336	375	89,6	Sangat Baik
6	Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah melaksanakan evaluasi Dana Desa.	326	375	86,93	Sangat Baik
7	Menurut saya, Inspektorat Kabupaten telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Dana Desa.	323	375	86,13	Sangat Baik
8	Menurut saya hasil pemeriksaan Inspektorat telah ditindaklanjuti sesuai saran/rekomendasi dari inspektorat.	326	375	86,93	Sangat Baik
9	Menurut saya, Inspektorat Kabupaten perlu melaksanakan bimbingan teknis terkait pengelolaan Dana Desa kepada aparat desa.	335	375	89,33	Sangat Baik
10	Selain yang sudah disebutkan diatas inspektorat masih perlu melakukan pembinaan dan pengawasan lainnya.	328	375	87,47	Sangat Baik
Rata-Rata Nilai:		325	375	86,67	Baik

Deskripsi Data Variabel Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa

Tabel 4.9 Deskripsi Data Variabel Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah desa atas dana desa

Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah desa atas dana desa	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Baik	42 – 50	63	84,00
Baik	34 – 41	12	16,00
Cukup Baik	26 – 33	0	0
Tidak Baik	18 – 25	0	0
Sangat Tidak Baik	10 – 17	0	0
Jumlah		50	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Dari table 4.9 di atas terlihat sebagian besar aparat kampung memiliki anggapan bahwa Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah desa atas dana desa pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah masuk dalam kategori yang Sangat Baik yaitu 84%, dan dari table 4.10 di atas maka kategori jawaban responden pada variabel Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah desa atas dana desa menurut setiap pertanyaan adalah masuk dalam kategori Sangat Baik atau dengan nilai rata-rata persentase 87.73%. Hasil tersebut berarti Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah desa atas dana desa yaitu Transparan (informasi, keterbukaan), akuntabel (dalam tahap pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban), partisipasi (musyawarah desa dan swadaya masyarakat), dan tertib dan disiplin (kesesuaian terhadap aturan, menggunakan system aplikasi, dan tepat waktu) telah dilakukan dengan baik.

Tabel 4.10 Deskripsi Data Variabel Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah desa atas dana desa Berdasarkan Pertanyaan

No	Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah desa atas dana desa	Nilai Capaian	Nilai Maksimal	Persentase Capaian	
1	Laporan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka melalui media massa atau di banner yang mudah di lihat masyarakat	331	375	88,27	Sangat Baik
2	Laporan keuangan yang kami hasilkan telah disajikan secara jujur dan wajar	331	375	88,27	Sangat Baik
3	Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes	325	375	86,67	Sangat Baik
4	Penyusunan anggaran pemerintah desa, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran.	324	375	86,4	Sangat Baik
5	Laporan keuangan desa diperiksa oleh Inspektorat dan pemdes melakukan analisis laporan keuangan untuk dapat mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan anggaran	320	375	85,33	Sangat Baik
6	pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes.	334	375	89,07	Sangat Baik
7	tahap pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh DD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola	335	375	89,33	Sangat Baik
8	Menurut saya, kebutuhan perencanaan dalam pengelolaan DD sangat diperlukan agar pengelolaan DD menjadi optimal	337	375	89,87	Sangat Baik
9	Penyusunan laporan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes	332	375	88,53	Sangat Baik
10	Penyusunan dan penyerahan laporan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu	321	375	85,6	Sangat Baik
	Rata-Rata Nilai:	329	375	87.73	Sangat Baik

Analisis Kuantitatif
Regresi Linier Berganda

Tabel 4.11 Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.263	5.452		4.634	.000
	Pembinaan_DPMK	.166	.131	.165	1.274	.207
	Pengawasan_Inspektorat	.260	.129	.262	2.020	.047

a. Dependent Variable: Pengelolaan_PertanggungjawabanDanaDesa

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + E_t$$

$$Y = 25.263 + 0.166 X_1 + 0.260 X_2 + E_t$$

Hasil uji tersebut, dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Constanta nilai α 25.263 bermakna bahwa, jika Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat dianggap konstan maka Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa akan tetap memiliki nilai yang konstan sebesar 25,263 Point.
2. Variabel X_1 memiliki nilai β_1 0,166 bermakna bahwa, jika Pembinaan DPMK ditingkatkan 1 persen dan Pengawasan Inspektorat dianggap konstan maka Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa akan meningkat sebesar 0,166 Point.
3. Variabel X_2 memiliki nilai β_2 0,260 bermakna bahwa, jika Pengawasan Inspektorat ditingkatkan 1 persen dan Pembinaan DPMK dianggap konstan maka Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa akan meningkat sebesar 0,260 Point.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi X_2 lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien regresi X_1 . Hal ini menunjukkan kontribusi variabel Pengawasan Inspektorat lebih tinggi atau dominan dibandingkan Pembinaan DPMK dalam meningkatkan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Koefisien Korelasi Secara Parsial

Tabel 4.12 Koefien Korelasi Secara Parsial

Correlations

		Pembinaan_ DPMK	Pengawasan_ Inspektorat	Pengelolaan_ Pertanggungj awaban_DD
Pembinaan_DPMK	Pearson Correlation	1	.539**	.306**
	Sig. (2-tailed)		.000	.008
	N	75	75	75
Pengawasan_Inspektorat	Pearson Correlation	.539**	1	.351**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002
	N	75	75	75
Pengelolaan_Pertanggungj awaban_DD	Pearson Correlation	.306**	.351**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.002	
	N	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018 Berdasarkan data di atas maka dapat diuraikan:

- a. Koefisien korelasi antara Pembinaan DPMK dengan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa pada Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 0.306, hubungan antar kedua variabel dalam kategori “lemah” karena berada pada interval (0.201-0.400) dan arah korelasi (+) artinya jika Pembinaan DPMK ditingkatkan dengan baik maka akan meningkatkan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa. Sebaliknya jika Pembinaan DPMK tidak ditingkatkan dengan baik maka akan menurunkan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa.
- b. Koefisien korelasi antara Pengawasan Inspektorat dengan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa pada Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 0.351, hubungan antar kedua variabel dalam kategori “lemah” karena berada pada interval (0.201-0.400) dan arah korelasi (+) artinya jika Pengawasan Inspektorat ditingkatkan maka akan meningkatkan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa. Sebaliknya jika Pengawasan Inspektorat tidak ditingkatkan maka akan menurunkan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa.

Koefisien Korelasi Secara Simultan

Tabel 4.13 Koefien Korelasi Secara Simultan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1 ^a	.377	.142	.119	3.119

- a. Predictors: (Constant), Pengawasan_Inspektorat, Pembinaan_DPMK
- b. Dependent Variable: Pengelolaan_PertanggungjawabanDanaDesa

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018

Koefisien korelasi Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat dengan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa pada Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 0.377, hubungan antar kedua variabel dalam kategori “lemah” karena berada pada interval (0.201-0.400) dan arah korelasi (+) artinya jika Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat ditingkatkan maka akan meningkatkan Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa. Sebaliknya jika Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat tidak ditingkatkan maka akan menurunkan tingkat Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa.

Koefisien Determinasi Secara Parsial

Tabel 4.14 Koefien Determinasi X1 terhadap Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.306 ^a	.094	.081	3.184

a. Predictors: (Constant), Pembinaan

b. Dependent Variable: PPDDS

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil tersebut maka didapatkan nilai Koefisien Penentu (KP) = $r^2 = 0.306 \times 0.306 = 0.0936 \times 100\% = 9.4\%$. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh Pembinaan DPMK terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa adalah 9.4%.

Tabel 4.15 Koefien Determinasi X2 terhadap Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.351 ^a	.123	.111	3.132

a. Predictors: (Constant), Pengawasan

b. Dependent Variable: PPDDS

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2019

Berdasarkan hasil tersebut didapatkan nilai Koefisien Penentu (KP) = $r^2 = 0.351 \times 0.351 = 0.123 \times 100\% = 12.3\%$. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa adalah 12.3%.

Koefisien Determinasi Secara Simultan

Tabel 4.16 Koefien Determinasi Secara Simultan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.377 ^a	.142	.119	3.119

a. Predictors: (Constant), Pengawasan_Inspektorat, Pembinaan_DPMK

b. Dependent Variable: Pengelolaan_PertanggungjawabanDanaDesa

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018

Hasil tersebut menunjukkan nilai koefisien determinasi secara simultan dengan nilai Koefisien Penentu (KP) = $r^2 = 0.377 \times 0.377 = 0.142 \times 100\% = 14.2\%$. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa atas dana desa adalah 14.2% dan sisanya sebesar 85.8% dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak diteliti, seperti kompetensi perangkat desa, tingkat perpindahan/mutasi pada pengelola keuangan desa/perangkat desa, peraturan-peraturan yang cepat berubah dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban, dan sebagainya.

Uji Hipotesis Secara Parsial

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.17 Uji Hipotesis Secara Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.263	5.452		4.634	.000
	Pembinaan_DPMK	.166	.131	.165	1.274	.207
	Pengawasan_Inspektorat	.260	.129	.262	2.020	.047

a. Dependent Variable: Pengelolaan_PertanggungjawabanDanaDesa

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS V.23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat dijabarkan hasil uji hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

Uji Hipotesis X1 terhadap Y:

Berdasarkan Uji t atau t tes didapatkan nilai thitung sebesar 1.274 dengan taraf signifikan 0.207, karena *probability* lebih besar dari 0.05 maka Pembinaan DPMK tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa.

Uji Hipotesis X2 terhadap Y:

Berdasarkan Uji t atau t tes didapatkan nilai thitung sebesar 2.020 dengan taraf signifikan 0.047, karena *probability* lebih kecil dari 0.05 maka Pengawasan Inspektorat berpengaruh terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa atas Dana Desa.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Anova)

Uji Anova (uji F) ini digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4.18 Uji Hipotesis X1 dan X2 terhadap Y

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	116.360	2	58.180	5.982	.004
Residual	700.307	72	9.726		b
Total	816.667	74			

- a. Dependent Variable: Pengelolaan_PertanggungjawabanDanaDesa
- b. Predictors: (Constant), Pengawasan_Inspektorat, Pembinaan_DPMK

Berdasarkan Uji Anova atau F tes didapat F hitung sebesar 5.982 dengan taraf signifikan sebesar 0.004, karena *probability* jauh lebih kecil dari 0.05 maka Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat berpengaruh terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa atas Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan DPMK tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan desa atas Dana Desa sedangkan Pengawasan Inspektorat berpengaruh terhadap Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan desa atas Dana Desa. Jika pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat dilakukan secara bersama-sama maka akan berpengaruh terhadap Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan desa atas Dana Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pembinaan DPMK pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori Sangat Baik (88,08%) artinya fasilitasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa telah dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan aparat kampung, monitoring dan evaluasi dan dukungan teknis administrasi dalam memberikan pedoman pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel telah memberikan dampak yang positif dalam pengelolaan keuangan desa atas dana desa.

Pengawasan inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori sangat baik (86,67%) artinya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam bentuk audit, reuiu, monitoring, evaluasi dan pemantauan telah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan keuangan pemerintah desa atas dana desa pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori sangat baik (87,73%) artinya pengelolaan pertanggungjawaban telah transparan (informasi, keterbukaan), akuntabel (pada pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian), partisipasi (telah melalui musyawarah desa dan partisipasi masyarakat desa), tertib dan disiplin anggaran (kesesuaian terhadap aturan, menggunakan sistem aplikasi keuangan dan tepat waktu). Pembinaan DPMK tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa atas dana desa pemerintah Kabupaten Lampung tengah. Pengawasan Inspektorat berpengaruh terhadap pengelolaan

keuangan pemerintah desa atas dana desa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Pembinaan DPMK dan Pengawasan Inspektorat yang dilaksanakan dengan baik secara bersama-sama dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah desa atas dana desa.

Saran

DPMK Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan untuk meningkatkan pembinaan baik dalam hal fasilitasi, pendampingan, dan memberikan pelatihan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan yang baik. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan pertanggungjawaban keuangan desa baik untuk aparat Pembina juga untuk pelaksana pengelola keuangan desa. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan yang lebih fokus dan dapat dilaksanakan untuk seluruh desa dan dilakukan secara terus-menerus. Selain itu perlu dilakukan pemantauan atas hasil pemeriksaan sebelumnya, apakah rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Pemerintahan Desa, diharapkan dalam pengelolaan keuangan desa lebih meningkatkan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung,.....
.....(Vera, Syamsyu, Indrayenti, Khairudin,Dan Haninun).....86

Daftar Pustaka

- Deegan, C. 2004. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Book Company. Sydney.
- Dowling, J. and Pfeffer, J. (1975), “Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior”, *Pacific Sociological Review*, Vol 18 No 1, pp. 122- 36.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. *Modul 1 Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LAN Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 44 2016 Tentang Kewenangan Desa
- PP 12 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- SE Mendagri Nomor 700/1281/A.1/19 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa
- UU NO 6 2014 Tentang Desa